

Relevansi Kebijakan Literasi Dengan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Materi Pokok Madrasah Ibtidaiyah

(Telaah Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Dengan Perpres No. 87 Tahun 2017)

Fifi Aris Wulandari ^{a*}, Andi Prastowo ^b

^a Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^b Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author

Jl. Laksda Adisucipto, Papingan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Alamat email: 19204080047@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang yang dipandang sangat berperan penting dalam bidang pemerintahan. Salah satu masalah pendidikan adalah turunnya kualitas baca pada siswa disebabkan kurangnya literasi yang diterapkan di sekolah. Artikel ini membahas mengenai kebijakan pendidikan dengan menggunakan metode studi literatur yang menggunakan beberapa sumber artikel, penelitian dan lainnya yang berhubungan dengan artikel ini yang bertujuan untuk menggali permasalahan dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan jiwa literasi pada jenjang Sekolah dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 meluncurkan sebuah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini berupa Gerakan Literasi Nasional yang memiliki 3 ranah salah satunya adalah Gerakan Literasi Sekolah yang digunakan dalam membentuk perilaku berbudi pekerti baik kepada siswa dengan berbahasa atau literasi yang menjadi langkah awal untuk menciptakan budaya literasi dan hasrat membaca pada siswa. Gerakan Literasi Sekolah ini tidak hanya memahami bacaan dan keterampilan menulis saja, melainkan meliputi kemampuan dan kereatifitas berfikir yang sesuai dengan komponen dan tahapan dalam literasi. Gerakan literasi sekolah diharapkan mampu membawa perubahan baik dari segi perilaku, sikap dan tanggung jawab serta menanamkan dan menumbuhkan nilai karakter siswa sejak dini yaitu nilai mandiri, Nasionalisme, gotong royong religius, dan integritas pada siswa jenjang Sekolah Dasar. Nilai-nilai karakter tersebut juga tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah sangat berhubungan erat dengan Penguatan Pendidikan Karakter, karena untuk melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah yang berada di sekolah dan Penguatan Pendidikan Karakter dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal tetapi bisa berjalan ketika lembaga sekolah dan siswa bersikap aktif.

Kata Kunci

kebijakan pendidikan, gerakan literasi sekolah, penguatan pendidikan karakter

Abstract

The problem of education is one of the fields which is considered to be very important in the field of government. One of the problems of education is the decline in the quality of reading in students due to lack of literacy that is applied in schools. This article discusses educational policy using literary study methods that use several sources of articles, research and others related to this article that aims to explore the problems and what policies the government is doing to foster literacy at the elementary school level. Ministry of Education and Culture through Minister of Education and Culture Regulation No. 23 of 2015 launched an education policy. This educational policy is in the form of a National Literacy Movement which has 3 domains, one of which is the School Literacy Movement which is used in shaping good moral behavior towards students with language or literacy which is the first step to creating a culture of literacy and the desire to read to students. The School Literacy Movement does not only understand reading and writing skills, but also includes the ability and thoughtfulness of thinking in accordance with the components and stages in literacy. The school literacy movement is expected to be able to bring change both in terms of behavior, attitudes and responsibilities as well as instilling and growing student character values early on, namely the value of independence, nationalism, religious mutual cooperation, and integrity in elementary school students. The character values are also stated in Perpres No. 87 of 2017 concerning Strengthening Character Education (PPK). The National Literacy Movement and the School Literacy Movement are very closely related to the Strengthening of Character Education, because to implement the School Literacy Movement that is in schools and the Strengthening of Character Education can not be said to run optimally but can run when the school institutions and students are active.

Keywords

Education Policy, School Literacy Movement, Strengthening of Character Education

Pendahuluan

Abad 21 sering disebut sebagai abad informasi yang mana keterampilan literasi merupakan keterampilan/potensi terpenting dalam kehidupan manusia yang harus dimilikinya. Literasi ini tidaklah sekedar menulis dan membaca saja, tetapi mencakup *skill* dan kemampuan intelegent dengan memanfaatkan acuan wawasan yang berbentuk visual, cetak dan auditorio. Sejalan dengan pendapat Marocco *et al.* (2008: 5) bahwa kemampuan literasi ini memiliki empat hal yang terpenting yang harus dimiliki setiap manusia yaitu kemampuan pemahaman berpikir kritis, kemampuan intelektual tinggi, keterampilan dalam berpikir kritis, dan kemampuan berkerjasama yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Yunus, 2018). Berdasarkan survei *progres in International Reading Literacy Study* (IRLS) tahun 2011, kompetensi literasi siswa di indonesia masih menepati urutan yang sangat rendah dibanding dengan negara lainnya yang di nilai dan asesmen kemampuan dan keterampilan membaca yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) juga membuktikan bahwa kompetensi membaca menempatkan posisi terendah. Pada tahun 2000 berdasarkan penilaian PISA diketahui indonesia hanyalah mempunyai skor 371, dan mendapatkan ranking terendah ke tiga dari wilayah lain yang di nilai (Yunus, 2018).

Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga membawa kemunduran dalam minat membaca yang menyebabkan siswa-siswi lebih sering mengabdikan waktunya untuk menonton TV dan bermain smartphone (Ane, 2015). Seperti halnya hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan memperlihatkan bahwa pada jenjang Sekolah Dasar Negeri Rejowinangun Selatan 3 dan 4 di Magelang yang diteliti belum seluruhnya melaksanakan dengan maksimal Gerakan Literasi Sekolah disebabkan warga sekolah belum mengupayakan tindakan yang dapat meningkatkan dan mendukung dalam kemampuan dan keterampilan literasi membaca siswa di sekolah. Keinginan siswa-siswi untuk baca tulis di SDN pun

tergolong masih rendah. Jika mereka disajikan beberapa jenis teks, maka mereka merasa kurang tertarik untuk membacanya (Wulanjani et al., 2019). Hal ini sebagai peringatan keras untuk pemerintah dalam membangun jiwa literasi bagi bangsa Indonesia.

Memahami hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 mencetuskan salah satu kebijakan pendidikan yaitu Penumbuhan Budi Pekerti, yang diimplementasikan dengan Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam menyinergikan semua kemampuan atau potensi yang dimiliki manusia serta melibatkan khalayak umum memperluas pengembangan budaya literasi yang dilakukan secara utuh, baik dalam lingkup keluarga, sekolah/satuan pendidikan maupun masyarakat (Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Gerakan Literasi Nasional harapannya agar meningkatkan jiwa Literasi dalam diri siswa. Gerakan Literasi Nasional juga perlu diterapkan dalam perumusan materi pokok di Madrasah Ibtidaiyah karena dengan adanya literasi mampu menumbuhkembangkan siswa agar tertanam jiwa yang berkarakter baik. Salah satu ranah Gerakan Literasi Nasional yaitu Gerakan Literasi Sekolah yaitu usaha yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan secara terencana yang memiliki sifat partisipatif atau kontribusi, dengan adanya dukungan kolaboratif atau kerja sama dari berbagai elemen yang melibatkan warga sekolah, media massa, akademisi, masyarakat, penerbit, serta semua pihak yang berperan penting di bawah naungan dan koordinasi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun PPK Kemendikbud, 2017).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tidak lepas dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang “Hari Sekolah” yang menjelaskan pelaksanaan masuk sekolah dalam satu minggu hanya lima hari saja dengan pembebanan kerja pada guru. “Hari Sekolah” ini dipakai dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler oleh siswa, yang mana sekolah bekerja sama dengan madrasah diniyah sebagai pendidikan nonformal (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Hal ini menyebabkan prokontra pada elemen sekolah, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang merupakan suatu upaya dalam pergerakan pendidikan dibawah naungan satuan pendidikan yang bertujuan mempertajam dan memperkokoh keperibadian yang berkarakter pada siswa melalui penyelarasan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga, dengan mengaitkan dan kolaborasi dalam satuan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Penguatan Pendidikan Karakter adalah Implementasi dari Gerakan Literasi Sekolah yang memiliki tujuan untuk membentuk sikap berbudi pekerti luhur pada siswa dengan bahasa dalam proses pembelajaran. Literasi disini tidak hanya menulis dan membaca tetapi meliputi bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam hidup bermasyarakat yang memiliki tujuan menanamkan dan membentuk kualitas berbudi pekerti luhur terhadap siswa dalam kehidupan bermasyarakat sebab sejatinya pendidikan tidak sekedar membentuk manusia yang memiliki kecerdasan secara intelektual, namun juga kecerdasan secara spiritual dan emosional (Mulyo Teguh, 2013). GLN dan GLS sejalan dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter karena di dalam Gerakan Literasi Nasional dan Sekolah terdapat nilai karakter yang dikembangkan untuk kehidupan siswa dalam

keluarga maupun khalayak umum. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Relevansi Kebijakan Literasi dengan Penguatan Pendidikan Karakter pada Materi Pokok Madrasah Ibtidaiyah.

Berangkat dari masalah dan teori tersebut, artikel ini berusaha mengurai tentang Relevansi Kebijakan Literasi dengan Penguatan Pendidikan Karakter pada Materi Pokok Madrasah Ibtidaiyah. Adapun pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu *pertama*, apa pengertian, macam-macam dan proses kebijakan pendidikan?; *kedua*, bagaimanakah relevansi kebijakan gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah dalam mengembangkan materi pokok MI?; *ketiga*, apa pengertian, fungsi, tujuan dan urgensi penguatan pendidikan karakter? *Keempat*, bagaimana relevansi kebijakan penguatan pendidikan karakter terhadap perumusan materi pokok MI?

Metode

Desain penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library reasearch*) yang menggunakan bermacam-macam refrensi data kepustakaan untuk refrensi data artikel ini (Ratna & Reed, 2010). Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi yang memiliki kegunaan dalam menggali berbagai data-data yang memiliki kaitannya dengan variabel dalam artikel ini yang berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dokumen-dokuman, makalah atau artikel, jurnal, peraturan-peraturan, serta catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006). Objek kajian artikel ini penulis fokuskan pada tiga hal yakni pertama pada kebijakan pendidikan, gerakan literasi nasional (GLN) dan gerakan literasi sekolah (GLS), dan penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam dunia pendidikan. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian pustaka, sebagaimana data-data primer yang penulis gunakan merujuk pada buku dan peraturan pemerintah RI: *pertama*, Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objek Pendidikan di Indonesia; *kedua*, Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Panduan Gerakan Literasi Nasional*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; *ketiga*, Penguatan Pendidikan Karakter, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017*, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 6 September 2017.

Penulis memilih karya-karya tersebut sebagai sumber primer adalah karena memuat banyak hal yang berkaitan dengan tema artikel yang penulis angkat. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan adalah berupa beberapa buku, jurnal dan permendikbud tentang yang berkaitan dengan Gerakan Literasi Nasional (GLN), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Hasil

Kebijakan dalam Pendidikan

Kata “*kebijakan*” terdapat dalam kata terjemahan dari “*policy*”, memiliki arti mengurus masalah/problem atau keperluan umum, bisa disebut dengan administrasi dalam pemerintah (Hasbullah, 2015). Kebijakan dalam artikel ini berhubungan dengan masalah pendidikan. Pendidikan yaitu pembentukan karakter terhadap segala perilaku manusia yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dengan bimbingan pendidik. Pendidikan di

sekolah merupakan pendidikan ke-2 setelah pendidikan keluarga sekaligus lanjutan dari pendidikan keluarga (Cahyono & Iswati, 2018). Pendidikan disekolah memiliki kebijakan tertentu yang di cita-citakan oleh lembaga sekolah yang tertuang didalam visi dan misi sekolah itu sendiri. Terjemahan lain yang berkaitan kebijakan pendidikan yaitu “*educational policy*” yang berasal dari dua kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah serangkaian aturan, dan pendidikan berhubungan dengan bidangnya. Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian aturan pendidikan yang berasal dari pemerintah untuk membentuk satu sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama dalam periode tertentu Hasbullah, 2015 Kebijakan pendidikan dapat disimpulkan menjadi serangkaian aturan yang berkaitan erat dengan pendidikan yang digunakan untuk ketercapaiannya tujuan tertentu yang dituangkan dalam rencana dan tujuan pendidikan dalam periode tertentu.

Macam-macam kebijakan pendidikan berdasarkan tingkatannya yaitu: *pertama*, kebijakan Nasional atau *national policy level* yang dimiliki oleh MPR/DPR/DPD yang sering disebut sebagai kebijakan administrative dan berlaku secara nasional. Contohnya produk MPR yaitu konstitusi UUD 1945 yang amandemennya berkaitan atau berisi pasal-pasal yang berkenaan pendidikan nasional. *Kedua*, Kebijakan khusus atau *special policy level*, dalam hal ini yang menentukan kebijakan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembantu Presiden. Bentuknya berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri dan Instruksi menteri. *Ketiga*, kebijakan teknis atau *technical policy level*, dapat diartikan sebagai kebijakan operatif sebab kebijakan ini adalah sebagai patokan pelaksanaan. Kebijakan ini yang menentukan adalah Pejabat Eselon 2 ke bawah, yaitu pimpinan lembaga non-departemen atau Direktorat Jendral. Bentuk kebijakannya berkaitan dengan keputusan, peraturan, dan instruksi pimpinan lembaga (Hasbullah, 2015). Kebijakan Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah termasuk kebijakan khusus, sedangkan Penguatan Pendidikan karakter termasuk kebijakan umum. Proses pembuatan kebijakan pendidikan melalui tahap demi tahap, dimana antara tahapan saling melekat dan tidak dapat memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat *Parsons* bahwa proses dasar perumusan kebijakan pendidikan dimulai tahap demi tahap yaitu tahapan merumuskan masalah, tahapan mengidentifikasi alternatif solusinya, tahapan asesmen alternatif, tahapan menyeleksi alternatif, tahapan mengimplementasi kebijakan dan kembali ke tahapan merumuskan masalah. Pada sela-sela tahapan yang dilalui tersebut, diselipkan evaluasi/penilaian maupun interpretasi (Hasbullah, 2015). Tahapan kebijakan tersebut secara tidak langsung akan diulang-ulang hingga benar-benar tercapainya cita-cita yang diinginkan bersama.

Relevansi Kebijakan Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah dalam Mengembangkan Materi Pokok MI

Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang merupakan pengimplementasian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 yang berkaitan Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan Literasi Nasional merupakan usaha yang dilaksanakan untuk menyinergikan semua kemampuan yang dimiliki manusia serta khalayak umum di elemen keluarga, sekolah maupun masyarakat untuk memperluas dan mengembangkan berbudaya literasi yang dilakukan secara utuh dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbudaya literasi dalam sistem ekologi pendidikan dalam rangka pembelajaran sepanjang hidup dalam suatu usaha yang dapat meningkatkan dan menumbuhkan kualitas hidup untuk masa depan

emas Indonesia Tahun 2045. Salah satunya Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat GLS adalah gerakan dalam literasi yang banyak beraktivitas di lingkungan sekolah yang melibatkan siswa, pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua. GLS dapat dilakukan dengan menyajikan praktik dalam segala hal yang berkaitan dengan literasi dan menerapkan sebagai budaya dalam sekolah. Literasi menjadi salah satu bagian yang sangat berhubungan erat dengan segala rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dan pendidik, baik di kelas maupun diluar kelas karena literasi dapat mengintegrasikan dalam belajar mengajar di sekolah (Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan GLS merupakan upaya dalam suatu kegiatan yang memiliki sifat keikutsertaan atau kontribusi, dengan adanya dukungan kolaboratif dari berbagai elemen yang melibatkan semua warga sekolah, penerbit, akademisi, masyarakat, media massa, serta pemangku kepentingan dibawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Yunus, 2018). Hal ini menjadi salah satu strategi penopang GLN sebab mekanisme pengelolaan ekosistemnya berada pada ranah sekolah, keluarga dan masyarakat. GLS dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang berhubungan dengan tupoksi Kemendikbud, yang dikhususkan pada Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9 Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Butir Nawacita yang dimaksud adalah: (5) menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di Indonesia; (6) menaikkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebinekaan dan memperkokoh modernisasi sosial Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016).

Selain itu GLS yang diterapkan dalam sekolah-sekolah dasar mengacu pada GLS yang tertuang pada Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, harapannya hal tersebut dapat diaplikasikan pula disekolah pada seluruh jenjang yang memiliki sasaran tidak hanya siswa saja, tetapi diharapkan seluruh warga sekolah dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan berliterasi. Disimpulkan bahwa Gerakan Literasi Nasional merupakan usaha yang dilaksanakan untuk menggabungkan segala kemampuan manusia yang dimilikinya, dalam menumbuhkembangkan budaya literasi yang berada di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sedangkan Gerakan Literasi Sekolah merupakan usaha yang dilaksanakan untuk menggabungkan kemampuan yang dimiliki siswa untuk menumbuhkembangkan berbagai kepribadian yang berkarakter, yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, oleh semua pihak yang saling berkesinambungan. GLN dan GLS memiliki tujuan yang sama-sama menciptakan budaya literasi dan menanamkan nilai karakter bagi siswa.

GLN dan GLS berkaitan erat dengan materi pokok Madrasah Ibtidaiyah yang berada pada lingkungan sekolah dengan diwujudkan berupa pembiasaan membaca, menulis dan intelektual kritis pada siswa. Contohnya adalah pembiasaan membaca yang dilakukan dengan melakukan kegiatan membaca dalam waktu 15 menit (guru membacakan materi si buku dan siswa mengikuti membaca dalam hati, yang diselaraskan dengan keadaan dan tujuan sekolah).

Jika sudah terbentuk pembiasaan membaca, maka berikutnya akan diarahkan pendidik ke tahap berikutnya yaitu pembelajaran dan pengembangan (Yunus, 2018). Sejalan dengan hasil penelitian Agus Widayoko, Supriyono Koes H & Muhardjito, 81,6% responden mengatakan bahwa program GLS sudah terlaksana di sekolah dengan membiasakan membaca dalam waktu 15 menit sebelum pembelajaran di kelas (Widayoko & Muhardjito, 2018). Setiap mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, siswa diharuskan membaca materi pelajaran yang akan dipelajari untuk merangsang dan merespon otak untuk berfikir dan berpendapat tentang materi yang dipelajari, serta memberikan pemahaman siswa dalam materi yang dibaca.

Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dimaksud didalam kurikulum 2013 revisi 2017 merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang merupakan Gerakan yang dilakukan untuk memperkuat karakter yang dimiliki siswa melalui penyalarsan olah pikir, olah raga, olah hati, dan olah rasa dengan melibatkan semua pihak dan berkolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pada pasal ke 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017, PPK mempunyai prinsip berorientasi dalam mengembangkan siswa secara terpadu dan menyeluruh, teladan dalam pembentukan karakter dalam suasana pendidikan dan berlangsung dalam pembiasaan sepanjang waktu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Assingkily, 2019): Penguatan pendidikan karakter adalah proses membentuk, merubah, dan transmisi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa dalam ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Assingkily, 2019). Jadi pendidikan karakter merupakan proses pembentukan semua potensi siswa baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

Pendidikan karakter berfungsi sebagai: (1) membangun dan membentuk kehidupan yang multikultural dalam hidup berbangsa; (2) membangun beradaban bangsa yang berbudi luhur, cerdas, dan mampu bekerjasama dan berkolaborasi dalam pengembangan kehidupan manusia, menumbuhkembangkan kemampuan dasar agar lebih baik, berpikir dan membentuk perilaku baik serta memiliki teladan yang baik; (3) membangun dan menumbuhkan sikap kewarganegaraan yang mandiri, kreatif, cinta damai, dan mampu melaksanakan hidup bersama dengan bangsa dalam suatu harmoni (Assingkily, 2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2017 Pasal 2 menjelaskan bahwa Penguatan tujuan Pendidikan Karakter adalah: *pertama*, membekali dan membentuk siswa guna untuk menghadapi dinamika kehidupan yang berubah pada masa mendatang dengan jiwa pancasila dan berpendidikan karakter yang baik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045; *kedua*, menumbuhkembangkan program kerja pendidikan nasional dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia yang dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu jalur formal, nonformal, dan informal; *ketiga*, mereaktualisasi dan memperkuat kompetensi dan potensi siswa, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Terdapat 5 nilai prioritas utama dalam Penguatan Pendidikan Karakter yaitu (1) religius yang mencerminkan patuh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan Yang Maha Esa; (2) nasionalisme, berarti memprioritaskan kepentingan bersama, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok; (3) mandiri yang berarti mempergunakan

pikiran dan tenaganya untuk meraih mimpi, tujuan cita-cita, dan tidak tergantung pada orang lain; (4) gotong-royong yang berarti bekerjasama dan saling bahu membahu menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan mencerminkan tindakan menghargai orang lain; (5) integritas yang berarti upaya membentuk diri sendiri sebagai orang yang selalu dipercaya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan nilai karakter dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 yang diimplementasikannya nilai Pancasila dalam pendidikan karakter meliputi nilai karakter religius, mandiri, disiplin, jujur, toleransi, bekerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, demokratis, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, komunikatif, peduli dengan lingkungan, empati, menghargai prestasi, gemar membaca, dan bertanggungjawab (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pentingnya Program Penguatan Pendidikan Karakter memang harus digalakkan di setiap sekolah, bukan sekedar suatu formalitas belaka, namun memang harus direalisasikan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki berkualitas supaya dapat bersaing dengan bangsa lain dan meminimalisir degradasi moral anak pada jenjang sekolah dasar.

Relevansi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Perumusan Materi Pokok MI

Penguatan Pendidikan Karakter sangat memiliki arti penting dalam perumusan materi pokok MI/SD karena memiliki 5 nilai prioritas utama yaitu nilai religius dalam penerapannya saat proses pembelajaran berlangsung siswa memulainya dengan membaca doa serta tadarus terlebih dahulu. Nilai nasionalisme contohnya sebelum proses pembelajaran berlangsung siswa bersama-sama menyanyikan lagu Nasional terlebih dahulu dipimpin oleh pendidik. Terlihat juga di kelas ada beberapa foto pahlawan Nasional. Siswa juga saling tolong menolong dalam mengerjakan sesuatu dan saling menghargai satu sama lain. Selalu mengambil keputusan dengan cara musyawarah terlihat saat membuat peraturan di kelas.

Nilai mandiri contohnya siswa memiliki semangat mengerjakan soal ketika ulangan/ujian berlangsung, sebelum memulai pembelajaran siswa juga membaca buku (literasi) cerita yang ada di kelas tanpa harus menunggu perintah dari guru, siswa membaca surah Al-quran (tadarus) bersama-sama setelah masuk kelas tanpa didampingi oleh guru. Nilai gotong royong dalam pembelajaran tematik terdapat tugas kelompok yang harus diselesaikan secara bersama dan saling kerjasama untuk menghasilkan pokok pemikiran yang baik. Nilai Integritas sebagai contoh dalam mengerjakan tugas di kelas siswa mengerjakannya dengan jujur dan bertanggung jawab (Widodo, 2018). Penguatan pendidikan karakter sangat penting ditanamkan sejak dini yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter anak. Usia dini merupakan masa kritis dan mudah untuk membentuk karakter anak, karena pada tahap ini anak-anak akan menyerap apa yang dilihat dan didengar.

Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian serta karakter siswa di sekolah. Penguatan pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui pembelajaran tematik di sekolah yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan dilakukan melalui kegiatan di sekolah yang dilakukan sebagai rutinitas serta melalui penanaman pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran tematik sehari-hari. Hal ini sesuai pendapat Muslich yang mengemukakan bahwa pendidikan karakter dapat digabungkan dan dileburkan dalam proses

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Tujuan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kepribadian baik dalam diri siswa agar terbentuk dan menjadi lebih baik (Widodo, 2018)

Kesimpulan

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian peraturan pendidikan dari pemerintah untuk menciptakan satu mekanisme pendidikan yang disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Gerakan Literasi Nasional yang memiliki 3 ranah. Salah satu ranah GLN ini adalah gerakan literasi sekolah yang berada di lingkungan Sekolah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hasil dari telaah pustaka bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan dalam hal literasi yaitu Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang diimplementasikan dengan Gerakan Literasi Nasional yang salah satu ranahnya adalah Gerakan Literasi Sekolah. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tidak lepas dari Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mana dalam melaksanakan sekolah hanya 5 hari dalam 1 minggu, hal ini dirasa tidak efektif, kemudian dikeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mana disekolah tidak hanya membaca dan menulis saja tetapi dengan adanya Presiden No. 87 Tahun 2017 bisa membentuk siswa berbudi pekerti luhur dengan melekatnya nilai yang berkarakter bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan literasi Sekolah dengan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan yang sama yaitu dengan menumbuhkan nilai budi pekerti luhur dengan nilai karakter bangsa yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong dan integritas untuk menyiapkan siswa yang berguna untuk bangsa dan negara. Kebijakan pendidikan dibagi menjadi empat tingkatan yaitu kebijakan nasional, kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis. Salah satunya kebijakan teknis yaitu kebijakan literasi di sekolah yang mana siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan membaca ini untuk membiasakan siswa untuk membaca dengan waktu 15 menit ketika pembelajaran. Tujuan membiasakan membaca salah satunya untuk membentuk dan menumbuhkan nilai-nilai karakter bangsa pada siswa, dengan adanya nilai karakter bangsa maka akan membentuk pribadi yang baik dan berguna bagi Keluarga, Masyarakat dan Negara yang sejalan dengan adanya Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Artikel ini diharapkan agar pembaca mengetahui jika Gerakan Literasi dan Penguatan Pendidikan Karakter yang sangat berkaitan erat dengan materi pokok pada Madrasah Ibtidaiyah dan diharapkan peneliti yang akan datang bisa lebih meneliti ke lapangan bagaimana proses literasi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar.

Referensi

- Ane, P. (2015). *Membangun kualitas bangsa dengan budaya literasi. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015. - Penelusuran Google*. FKIP Universitas Bengkulu. <https://www.google.com/search?q=Membangun+kualitas+bangsa+dengan+budaya+literasi.+Prosiding+Seminar+Nasional+Bulan+Bahasa+UNIB+2015.&oq=Membangun+kualitas+bangsa+dengan+budaya+literasi.+Prosiding+Seminar+Nasional+Bulan+Bahasa+UNIB+2015.&aqs=chrome..69i57j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitisan Suatu Pendekatan Praktik - Penelusuran Google*. PT Rineka Cipta.

<https://www.google.com/search?q=Prosedur+Penelitisn+Suatu+Pendekatan+Praktik&oq=Prosedur+Penelitisn+Suatu+Pendekatan+Praktik&aqs=chrome..69i57j0i13j69i59j0i13l7.1093j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

- Assingkily, M. S. (2019). *Studi Ilmu Pendidikan; Ditinjau dari Model, Pendekatan, Strategi, Kebijakan Pendidikan dan Studi Pemikiran Tokoh*. K-Media.
- Cahyono, H., & Iswati. (2018). MEMAHAMI PERAN DAN FUNGSI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KURIKULUM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Elementary*, 4(48).
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Kemdikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Hari Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017*. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ratna, N. K., & Reed, S. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Buku Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun PPK Kemendikbud. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah*. Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. .
- Widayoko, A., & Muhandjito, M. (2018). Analisis Program Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dengan Pendekatan Goal-Based Evaluation. *Jurnal Tatsqif*, 16(1).
- Widodo, H. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter di SD Muhammadiyah Mancanan Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Lentera Pendidikan*, 22(1).
- Wulanjani, Nisma, A., & Anggraeni, C. (2019). Meningkatkan Minat Membaca melalui Gerakan Literasi Membaca bagi Siswa Sekolah Dasar. *Proceeding of Biology Education*, 3(1).
- Yunus, A. (2018). *Strategi Peningkatan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca dan Menulis*. Bumi Aksara.